



SEBELUM NAIKKAN TARIF LAKUKAN STUDI BANDING

Tarif Baru RSUD Wirosaban Tetap Berlaku

YOGYA (KR) - Sambil menunggu Perda yang lama tentang retribusi pelayanan kesehatan dicabut, tarif baru di RSUD Wirosaban tetap berlaku. Namun Dewan mengingatkan Pemkot Yogyakarta untuk memperhatikan aspek legalitas karena Perda yang lama masih berlaku.

Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Iriantoko Cahyo Dumadi kepada *KR*, Jumat (27/2), mengatakan Perwal No 57/2008 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Wirosaban tetap berlaku. "Walaupun dalam aturan setelah menjadi BLUD bisa menentukan tarif sendiri, tetapi kami mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan legalitasnya. Kami minta RSUD tidak memberlakukan tarif baru di luar tarif yang diatur dalam Perwal," katanya.

Dikatakan, sebenarnya eksekutif sudah mengajukan pencabutan Perda lama yang

mengatur retribusi pelayanan kesehatan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dewan sudah menandatangani akan membahasnya pada triwulan pertama.

Sementara itu, Direktur RSUD Wirosaban dr Mulyo Hartono SpPD mengatakan kenaikan tarif pelayanan kesehatan tidak terlalu berdampak pada warga Kota Yogyakarta. Sebab 40 persen pasien RSUD Wirosaban berasal dari luar daerah, terutama Bantul. Sedang untuk warga Kota Yogyakarta, terutama gakin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) su-

dah terkaver dengan anggaran gakin. "Imbas dari kenaikan tarif pelayanan kesehatan hanya berdampak pada warga kelas menengah ke atas. Warga pemegang KMS di kota tetap ditanggung oleh pemkot," katanya.

Mulyo Hartono mengemukakan, sebelum mengajukan usulan kenaikan tarif kepada walikota, RSUD Wirosaban telah melakukan studi banding ke beberapa RSUD. Pada umumnya RSUD-RSUD yang dikunjungi telah menaikkan tarif pada tahun 2004, dan kini tengah bersiap-siap untuk menaikkannya lagi.

Hal itu dikemukakan Direktur RSUD Wirosaban Yogyakarta dr Mulyo Hartono SpPD berkait dengan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta No 57/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kota Yogyakarta (RSUD Wirosaban). Dicontohkan, sejak tahun 2004 tarif pelayanan poliklinik oleh dokter spesialis yang beraksi di RSUD Bantul sebesar Rp 25.000, Sleman Rp 14.100, Wonosari Rp 15.000, dan Tabanan Bali Rp 16.000. Sedang untuk pelayanan UGD, tarif yang berlaku sejak 2004 di RSUD Sleman Rp 15.000, Wonosari Rp 18.600, dan Tabanan Bali Rp 25.000. Menurutnya, kenaikan tarif itu juga dimungkinkan sehubungan dengan mening-

katnya status kelas RSUD Wirosaban, dari kelas C menjadi kelas B. Sebagai konsekuensinya, peningkatan kelas itu harus diimbangi dengan peningkatan standar minimal pelayanan. "Peningkatan standar minimal pelayanan itu sudah dilakukan RSUD Wirosaban yang berlangsung secara berangsur-angsur sehingga tidak begitu dirasakan oleh warga masyarakat perkembangan dan perubahan fasilitasnya," tuturnya.

Berkait dengan pernyataan anggota Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Yusron Achmadi, Kasubag Hukum dan Pelayanan Pelanggan RSUD Wirosaban Dyah Widyastuti SH mengemukakan Perwal Kota Yogyakarta No 57/2008 tentang Tarif Pelayanan Kese-

hatan pada RSUD Kota Yogyakarta telah mengakomodasi pelayanan terhadap pasien kurang/tidak mampu. Sebab mengiringi terbitnya Perwal, walikota mengiringinya dengan menerbitkan penjelasan atas Perwal tersebut.

Dinyatakan dalam penjelasan itu, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, RSUD Wirosaban tetap melaksanakan fungsi sosialnya melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda. Khusus untuk penduduk Yogyakarta yang tidak termasuk dalam penjaminan (tidak memiliki Kartu Menuju Sehat), diberikan keringanan pembiayaan 30% apabila dirawat di kelas III. (Nik/Ret/No)-f

aturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

mbusan Kepada Yth. :

Instansi		Tindak Lanjut
1. RSUD Wirosaban	Berkat dengan pernyataan anggota Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Yusron Achmadi, Kasubag Hukum dan Pelayanan Pelanggan RSUD Wirosaban Dyah Widyastuti SH mengemukakan Perwal Kota Yogyakarta No 57/2008 tentang Tarif Pelayanan Kese-	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
2. Dln. Kesehatan		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3.		<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.		
<input checked="" type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Biasa		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005